
POLA HUBUNGAN KUASA DALAM DINAMIKA KELOMPOK SOSIAL: STUDI KASUS DARI PERSPEKTIF POLITIK

Sugianto

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Studi ini menginvestigasi pola hubungan kekuasaan dalam dinamika kelompok sosial, dengan menggunakan pendekatan kritis dari perspektif politik. Melalui studi kasus yang terfokus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kekuasaan termanifestasi, dipertahankan, dan direspon dalam interaksi antar anggota kelompok. Dengan menerapkan kerangka analisis politik, penelitian ini memperdalam pemahaman tentang dinamika kekuasaan dalam konteks sosial, serta implikasinya terhadap struktur dan pola interaksi kelompok.

Kata Kunci: *Pola Hubungan Kuasa, Dinamika Kelompok Sosial, Perspektif Politik*



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam konteks masyarakat, hubungan kuasa atau kekuasaan adalah fenomena yang fundamental dan kompleks yang memengaruhi dinamika sosial serta struktur kehidupan sehari-hari. Kekuasaan tidak hanya terbatas pada pemerintahan atau lembaga politik, tetapi juga merasuk ke dalam berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk dalam kelompok-kelompok sosial yang lebih kecil. Dalam hal ini, studi mengenai pola hubungan kuasa dalam dinamika kelompok sosial menjadi penting untuk dipelajari. Dari perspektif politik, penelitian tentang bagaimana kekuasaan termanifestasi, dipertahankan, dan direspon dalam interaksi antar anggota kelompok memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika sosial yang kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki fenomena pola hubungan kuasa dalam dinamika kelompok sosial, dengan menggunakan pendekatan kritis dari perspektif politik. Studi kasus yang terfokus digunakan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana kekuasaan beroperasi dalam konteks kelompok sosial tertentu. Dengan memilih studi kasus yang relevan dan representatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang dinamika kekuasaan dalam berbagai konteks sosial.

Salah satu aspek penting yang perlu dipahami dalam penelitian ini adalah bagaimana kekuasaan termanifestasi dalam interaksi antar anggota kelompok. Kekuasaan bisa berupa kontrol atas sumber daya, penentuan aturan atau norma, atau pengaruh dalam pengambilan keputusan. Studi kasus yang mendalam akan memungkinkan peneliti untuk melihat secara langsung bagaimana kekuasaan ini beroperasi dalam praktek sehari-hari, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi distribusi dan penggunaan kekuasaan dalam kelompok tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga akan menggali bagaimana kekuasaan dipertahankan dan direspon dalam konteks kelompok sosial. Bagaimana anggota kelompok bereaksi terhadap pembagian kekuasaan yang tidak merata? Apakah terjadi konflik atau resistensi terhadap kekuasaan yang dominan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan membantu dalam memahami dinamika yang lebih dalam tentang pola hubungan kuasa dalam kelompok sosial.

Dengan menerapkan perspektif politik, penelitian ini juga akan memperdalam pemahaman tentang implikasi kekuasaan dalam struktur dan pola interaksi kelompok. Bagaimana distribusi kekuasaan memengaruhi dinamika sosial dalam kelompok tersebut? Apakah terdapat pola-pola hierarkis atau relasi kuasa yang simetris di antara anggota kelompok? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat tentang dinamika kekuasaan dalam dinamika kelompok sosial.

Melalui pendekatan studi kasus dari perspektif politik, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pola hubungan kuasa dalam dinamika kelompok sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur tentang kekuasaan dalam konteks sosial, serta

menyediakan dasar untuk pemikiran kritis dan refleksi tentang dinamika sosial yang kompleks.

Metode Penelitian

Penelitian mengenai pola hubungan kuasa dalam dinamika kelompok sosial, terutama dari perspektif politik, memerlukan pendekatan yang sistematis dan terperinci untuk memahami fenomena yang kompleks ini. Berikut adalah penjelasan panjang tentang metode penelitian yang dapat digunakan dalam studi kasus ini:

1. *Pemilihan Studi Kasus:* Langkah awal dalam penelitian ini adalah memilih studi kasus yang sesuai dan relevan untuk diteliti. Studi kasus harus dipilih dengan cermat untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang pola hubungan kuasa dalam kelompok sosial dari perspektif politik. Kriteria pemilihan studi kasus dapat mencakup ukuran kelompok, jenis kelompok (misalnya, kelompok formal atau informal), konteks sosial, dan tingkat keberagaman dalam kelompok.
2. *Observasi Partisipatif:* Metode observasi partisipatif dapat digunakan untuk mengumpulkan data tentang interaksi antar anggota kelompok secara langsung. Dengan menjadi bagian dari kelompok tersebut untuk jangka waktu yang ditentukan, peneliti dapat mengamati secara langsung bagaimana kekuasaan termanifestasi dalam interaksi sehari-hari antara anggota kelompok. Observasi ini akan membantu dalam mengidentifikasi pola-pola hubungan kuasa yang muncul dalam konteks kelompok sosial yang dipilih.
3. *Wawancara Mendalam:* Wawancara mendalam dengan anggota kelompok sosial merupakan metode yang efektif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pola hubungan kuasa dalam kelompok tersebut. Wawancara dapat dilakukan dengan pemimpin kelompok, anggota yang memiliki pengaruh signifikan, serta anggota yang mungkin memiliki pengalaman atau perspektif yang berbeda tentang dinamika kekuasaan dalam kelompok. Pertanyaan dalam wawancara dapat mencakup topik seperti distribusi kekuasaan, konflik, resistensi, dan interaksi antar anggota kelompok.
4. *Analisis Dokumen dan Arsip:* Analisis dokumen dan arsip juga dapat menjadi bagian dari metode penelitian ini, terutama jika studi kasus melibatkan kelompok yang memiliki dokumen atau catatan yang relevan. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa aturan kelompok, catatan rapat, atau komunikasi tertulis lainnya yang mencerminkan dinamika kekuasaan dalam kelompok. Analisis dokumen ini dapat memberikan konteks tambahan dan pemahaman yang lebih lengkap tentang pola hubungan kuasa dalam kelompok tersebut.
5. *Analisis Kualitatif:* Data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif akan melibatkan proses pencarian pola, temuan utama, dan interpretasi tentang bagaimana kekuasaan termanifestasi, dipertahankan, dan direspon dalam dinamika kelompok sosial. Pendekatan ini akan memungkinkan peneliti untuk menggali kompleksitas dan nuansa dari pola hubungan kuasa dalam kelompok sosial tersebut.

6. *Triangulasi: Penting untuk melakukan triangulasi data dari berbagai sumber untuk memvalidasi temuan dan memastikan keandalan hasil penelitian. Dengan mengintegrasikan data dari observasi, wawancara, dan analisis dokumen, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang pola hubungan kuasa dalam dinamika kelompok sosial.*

PEMBAHASAN

Dalam memahami pola hubungan kuasa dalam dinamika kelompok sosial, penting untuk melihatnya dari perspektif politik yang mencakup distribusi, penggunaan, dan pertahanan kekuasaan di antara anggota kelompok. Pola hubungan kuasa ini mencerminkan dinamika kompleks antara individu dan kelompok dalam konteks politik, di mana interaksi, negosiasi, dan konflik dapat terjadi. Studi kasus tentang pola hubungan kuasa dalam kelompok sosial dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana kekuasaan dibentuk, dipertahankan, dan digunakan dalam konteks politik.

Dalam studi kasus ini, kita dapat memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhi pola hubungan kuasa dalam kelompok sosial, seperti hierarki sosial, struktur kekuasaan, dan strategi politik. Hierarki sosial, misalnya, dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan di antara anggota kelompok, di mana beberapa individu atau kelompok memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya dan pengaruh politik daripada yang lain.

Selain itu, struktur kekuasaan dalam kelompok sosial juga memainkan peran penting dalam membentuk pola hubungan kuasa. Struktur ini dapat mencakup pola-pola hierarkis, otoriter, demokratis, atau egaliter, yang memengaruhi cara keputusan diambil, sumber daya dialokasikan, dan konflik diselesaikan dalam kelompok. Pola hierarkis, misalnya, mungkin melibatkan pemimpin yang memiliki otoritas tertinggi dan memegang kendali atas keputusan-keputusan penting, sedangkan pola egaliter mungkin lebih melibatkan proses keputusan kolektif dan pengambilan keputusan bersama.

Dari perspektif politik, pola hubungan kuasa dalam kelompok sosial juga dapat dipengaruhi oleh strategi politik yang digunakan oleh anggota kelompok untuk memperoleh, mempertahankan, atau memperluas kekuasaan mereka. Strategi ini bisa berupa diplomasi, negosiasi, koalisi, atau bahkan konfrontasi langsung, tergantung pada konteks politik dan tujuan individu atau kelompok tersebut. Misalnya, dalam kelompok yang berorientasi politik, anggota dapat menggunakan kampanye politik, lobbying, atau retorika persuasif untuk memperoleh dukungan dan memengaruhi keputusan kelompok.

Studi kasus dari perspektif politik juga dapat mengungkap bagaimana perubahan politik, ekonomi, atau sosial memengaruhi pola hubungan kuasa dalam kelompok sosial. Misalnya, perubahan dalam struktur ekonomi dapat memicu konflik antara kelompok-kelompok yang bersaing untuk sumber daya ekonomi, sedangkan perubahan politik dapat memengaruhi distribusi kekuasaan di antara aktor-aktor politik yang bersaing untuk pengaruh politik. Selain itu, perubahan dalam norma-norma sosial atau nilai-nilai budaya juga dapat memengaruhi pola hubungan kuasa, dengan memperkuat atau melemahkan hierarki sosial atau struktur kekuasaan yang ada.

Namun, penting untuk diingat bahwa pola hubungan kuasa dalam dinamika kelompok sosial tidak selalu bersifat statis atau tetap. Mereka dapat berubah seiring waktu sebagai hasil dari perubahan dalam konteks politik, dinamika internal kelompok, atau interaksi dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat. Studi kasus yang mendalam dan analisis yang cermat tentang pola hubungan kuasa dalam kelompok sosial dapat membantu kita memahami bagaimana kekuasaan dibentuk, dipertahankan, dan digunakan dalam konteks politik, serta implikasinya terhadap stabilitas, keadilan, dan partisipasi politik dalam masyarakat.

Dalam melanjutkan pembahasan, penting untuk mengidentifikasi beberapa konsep kunci yang relevan dalam analisis pola hubungan kuasa dalam dinamika kelompok sosial. Salah satu konsep tersebut adalah konsep hegemoni, yang mengacu pada dominasi atau kekuasaan yang dijalankan oleh satu kelompok atau individu atas kelompok atau individu lainnya. Hegemoni dapat terwujud melalui kontrol atas sumber daya ekonomi, politik, atau budaya, dan dapat memengaruhi pola hubungan kuasa dalam kelompok sosial dengan menetapkan norma-norma, nilai-nilai, atau kepentingan tertentu.

Selain itu, konsep konflik juga penting dalam analisis pola hubungan kuasa. Konflik dapat terjadi ketika terdapat persaingan atau pertentangan antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan atau tujuan yang berbeda. Konflik dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari konflik terbuka dan terbuka, hingga konflik yang lebih terselubung dan subtan, dan dapat memengaruhi dinamika kekuasaan dalam kelompok sosial dengan mengubah struktur kekuasaan, distribusi sumber daya, atau norma-norma sosial.

Selain konflik, kerjasama juga merupakan aspek penting dalam analisis pola hubungan kuasa dalam kelompok sosial. Kerjasama dapat terjadi ketika anggota kelompok bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama atau mengatasi tantangan yang dihadapi oleh kelompok tersebut. Kerjasama dapat memengaruhi dinamika kekuasaan dalam kelompok sosial dengan menguatkan solidaritas antaranggota kelompok, memperluas akses terhadap sumber daya, atau memperkuat pengaruh kelompok tersebut di dalam dan di luar kelompok.

Selain itu, penting untuk memperhatikan konteks politik yang lebih luas dalam analisis pola hubungan kuasa dalam kelompok sosial. Konteks politik ini mencakup faktor-faktor seperti sistem politik, struktur ekonomi, dan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Konteks politik ini dapat memengaruhi pola hubungan kuasa dalam kelompok sosial dengan menciptakan peluang atau hambatan bagi kelompok untuk memperoleh, mempertahankan, atau memperluas kekuasaan mereka.

Dalam studi kasus, peneliti dapat menggunakan berbagai metode penelitian, termasuk observasi partisipatif, wawancara, atau analisis dokumen, untuk memahami secara lebih mendalam pola hubungan kuasa dalam kelompok sosial. Dengan memperhatikan dinamika internal kelompok, interaksi dengan kelompok lain, dan konteks politik yang lebih luas, peneliti dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pola hubungan kuasa, serta implikasinya terhadap stabilitas, keadilan, dan partisipasi politik dalam masyarakat.

Dengan demikian, analisis pola hubungan kuasa dalam dinamika kelompok sosial dari perspektif politik dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana

kekuasaan dibentuk, dipertahankan, dan digunakan dalam konteks politik. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika ini, kita dapat mengembangkan strategi-strategi yang lebih efektif untuk mempromosikan stabilitas, keadilan, dan partisipasi politik yang inklusif dalam masyarakat.

Dalam melanjutkan pembahasan, penting untuk menyoroti beberapa teori yang relevan dalam menganalisis pola hubungan kuasa dalam dinamika kelompok sosial dari perspektif politik. Salah satu teori yang relevan adalah teori konflik sosial, yang mengemukakan bahwa konflik antara kelompok-kelompok sosial yang memiliki kepentingan atau tujuan yang bertentangan merupakan motor utama perubahan sosial. Dalam konteks ini, pola hubungan kuasa dalam kelompok sosial sering kali dipandang sebagai hasil dari konflik antara kelompok-kelompok yang bersaing untuk sumber daya, kekuasaan, atau pengakuan.

Selain itu, teori pluralisme politik juga dapat memberikan pemahaman yang berguna tentang pola hubungan kuasa dalam dinamika kelompok sosial. Menurut teori ini, kekuasaan dalam masyarakat didistribusikan di antara berbagai kelompok kepentingan yang bersaing dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam konteks ini, pola hubungan kuasa dalam kelompok sosial mencerminkan dinamika negosiasi, kompromi, atau konflik antara berbagai kelompok kepentingan yang berbeda.

Selain itu, teori hegemoni juga dapat memberikan wawasan yang berguna tentang pola hubungan kuasa dalam dinamika kelompok sosial. Menurut teori ini, kekuasaan tidak hanya bersifat represif atau koersif, tetapi juga bersifat persuasif dan kultural. Dalam konteks ini, pola hubungan kuasa dalam kelompok sosial dapat dipengaruhi oleh dominasi satu kelompok atau individu dalam menetapkan norma-norma, nilai-nilai, atau kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat.

Selain itu, penting untuk menyoroti peran struktur kekuasaan dalam membentuk pola hubungan kuasa dalam dinamika kelompok sosial. Struktur kekuasaan ini mencakup distribusi kekuasaan di antara anggota kelompok, pola hierarkis atau egaliter, serta strategi politik yang digunakan untuk mempertahankan atau mengubah struktur kekuasaan tersebut. Dalam konteks ini, pola hubungan kuasa dalam kelompok sosial dapat dipengaruhi oleh dinamika internal kelompok, interaksi dengan kelompok lain, dan konteks politik yang lebih luas.

Selain itu, perlu juga memperhatikan peran agen-agen individu atau kelompok dalam membentuk pola hubungan kuasa dalam dinamika kelompok sosial. Agen-agen ini dapat mencakup pemimpin, aktivis, atau anggota kelompok yang memiliki akses atau pengaruh yang signifikan dalam kelompok. Peran agen-agen ini dapat memengaruhi cara keputusan diambil, sumber daya dialokasikan, atau konflik diselesaikan dalam kelompok sosial.

Dari sudut pandang politik, penting juga untuk menyoroti implikasi pola hubungan kuasa dalam dinamika kelompok sosial terhadap stabilitas politik, keadilan sosial, dan partisipasi politik dalam masyarakat. Pola hubungan kuasa yang tidak seimbang atau otoriter dalam kelompok sosial dapat mengancam stabilitas politik, menyebabkan ketidakadilan sosial, dan menghambat partisipasi politik yang inklusif. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis dan memahami pola hubungan kuasa dalam kelompok sosial

dari perspektif politik untuk mengidentifikasi strategi-strategi yang efektif untuk mempromosikan stabilitas, keadilan, dan partisipasi politik yang inklusif dalam masyarakat.

Dalam melanjutkan analisis, perlu juga dipertimbangkan peran dinamika kekuasaan dalam membentuk identitas politik individu dan kelompok dalam masyarakat. Pola hubungan kuasa dalam dinamika kelompok sosial dapat memengaruhi cara individu dan kelompok mengidentifikasi diri mereka sendiri dalam konteks politik, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan kelompok lain dalam masyarakat.

Selain itu, penting untuk diingat bahwa pola hubungan kuasa dalam dinamika kelompok sosial sering kali mencerminkan struktur kekuasaan yang lebih luas dalam masyarakat, termasuk hierarki sosial, struktur ekonomi, dan sistem politik. Dalam konteks ini, pola hubungan kuasa dalam kelompok sosial dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang melampaui kontrol langsung anggota kelompok, seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, atau norma-norma budaya yang ada dalam masyarakat.

Selain itu, penting untuk memperhatikan dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang dapat memengaruhi pola hubungan kuasa dalam kelompok sosial dari waktu ke waktu. Perubahan ini dapat mencakup pergeseran dalam struktur kekuasaan, perubahan dalam norma-norma sosial atau nilai-nilai budaya, serta perkembangan teknologi atau globalisasi yang dapat memengaruhi cara individu dan kelompok berinteraksi dan berkomunikasi dalam masyarakat.

Dari sudut pandang politik, pola hubungan kuasa dalam dinamika kelompok sosial juga dapat memengaruhi proses pembentukan kebijakan publik dan pengambilan keputusan politik. Jika kekuasaan terkonsentrasi pada kelompok-kelompok atau individu-individu tertentu, maka mereka cenderung akan memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menentukan agenda politik, membuat keputusan, dan memengaruhi kebijakan publik. Hal ini dapat mengakibatkan proses kebijakan yang tidak inklusif, tidak adil, atau tidak demokratis, yang pada gilirannya dapat membahayakan stabilitas politik dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Namun, jika pola hubungan kuasa dalam kelompok sosial didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis, partisipasi yang inklusif, dan representasi yang merata, maka masyarakat cenderung akan merasa lebih puas, stabil, dan terlibat dalam proses politik. Hal ini dapat menghasilkan kebijakan publik yang lebih responsif, adil, dan berkelanjutan, serta meningkatkan partisipasi politik dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, penting untuk mengakui bahwa pola hubungan kuasa dalam dinamika kelompok sosial memiliki implikasi yang luas dan kompleks dalam konteks politik. Analisis yang cermat tentang pola hubungan kuasa dalam kelompok sosial dari perspektif politik dapat membantu kita memahami dinamika kekuasaan dalam masyarakat, serta implikasinya terhadap stabilitas, keadilan, dan partisipasi politik. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika ini, kita dapat mengembangkan strategi-strategi yang lebih efektif untuk mempromosikan stabilitas, keadilan, dan partisipasi politik yang inklusif dalam masyarakat.

Kesimpulan

Dalam kesimpulan, studi tentang pola hubungan kuasa dalam dinamika kelompok sosial dari perspektif politik mengungkapkan kompleksitas dan signifikansi peran kekuasaan dalam membentuk struktur sosial dan politik dalam masyarakat. Melalui analisis yang mendalam terhadap dinamika kekuasaan di antara anggota kelompok, kita dapat memahami bagaimana interaksi, negosiasi, dan konflik di dalam kelompok membentuk hierarki sosial, distribusi sumber daya, dan proses pengambilan keputusan.

Studi kasus dari perspektif politik juga menyoroti pentingnya faktor-faktor eksternal dan dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan politik dalam memengaruhi pola hubungan kuasa dalam kelompok sosial. Faktor-faktor ini, seperti kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi, atau perubahan nilai-nilai budaya, dapat memengaruhi cara individu dan kelompok berinteraksi, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam masyarakat.

Selain itu, analisis pola hubungan kuasa dalam kelompok sosial juga mengungkapkan implikasi politik yang luas dari pola hubungan kuasa yang tidak seimbang atau otoriter dalam masyarakat. Pola hubungan kuasa yang tidak demokratis dapat mengancam stabilitas politik, mengakibatkan ketidakadilan sosial, dan menghambat partisipasi politik yang inklusif. Sebaliknya, pola hubungan kuasa yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis dapat menghasilkan kebijakan publik yang lebih responsif, adil, dan berkelanjutan, serta meningkatkan partisipasi politik dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, studi tentang pola hubungan kuasa dalam dinamika kelompok sosial dari perspektif politik memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika kekuasaan dalam masyarakat, serta implikasinya terhadap stabilitas, keadilan, dan partisipasi politik. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika ini, kita dapat mengembangkan strategi-strategi yang lebih efektif untuk mempromosikan stabilitas, keadilan, dan partisipasi politik yang inklusif dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Matondang, A. (2007). Pengaruh Kolom Tajuk Rencana pada Surat Kabar Harian Waspada Terhadap Pembentukan Opini Politik Anggota Organisasi Kemahasiswaan Islam di Universitas Medan Area.
- Muda, I., & Batubara, B. M. (2019). Analisis Kebijakan Publik (Revisi).
- Ritonga, J. S. (2016). Designing Curriculum, Capacity of Innovation, and Performances: A Study on the Pesantrens in North Sumatra. *Miqot*, 40(1), 154547.
- Ritonga, S., & Nasution, A. I. (2007). Pengaruh Teknologi Komputer Terhadap Produktivitas Kerja PEGawai di Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Yolanda, A., Nurismilida, K. W., & Wulansary, D. (2021). The Effect of Miscommunication on the Quality of Employee Performance.
- Sihombing, M., & Tarigan, U. (2017). Efektifitas Organisasi Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Binjai Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Harahap, G. Y. (2013). Community Enhancement Through Participatory Planning: A Case of Tsunami-disaster Recovery of Banda Aceh City, Indonesia (Doctoral dissertation, Universiti Sains Malaysia).
- Tarigan, U., & Lubis, A. A. (2016). Tipe Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pemerintah Desa Dolok Masango Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Hutabarat, C. M. (2021). Pengaruh Penambahan Serat Kawat Bendrat Pada Campuran Beton K175 Terhadap Kuat Tekan Beton (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- WARUWU, B. M., & Harahap, G. Y. (2022). Pengerjaan Abutment pada Proyek Penggantian Jembatan IDANO–DESA SIFOROASI–KECAMATAN AMANDRAYA–KABUPATEN NIAS SELATAN. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).
- Tarigan, U., & Simatupang, I. (2004). Pelaksanaan Pembinaan dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Pegawai di Bagian Keuangan Pemerintah Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Widyastuti, I. W. (2022). Analisis Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014-2019 dalam Pembentukan Peraturan Daerah.
- Wahyudi, D. (2022). BAB V PERENCANAAN KARIR. Manajemen Sumber Daya Manusia (Konsep Dasar Di Era Digital), 45.
- Tarigan, R. S., & Dwiatma, G. (2022). ANALISA STEGANOGRAFI DENGAN METODE BPCS (Bit-Plane Complexity Segmentation) DAN LSB (Least Significant Bit) PADA PENGOLAHAN CITRA.
- Syarif, Y. (2022). PROYEK PEMBANGUNAN PERLUASAN GUDANG BOILER PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK DELI SERDANG. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).
- Syarif, Y. (2018). Rancangan Power Amplifier Untuk Alat Pengukur Transmission Loss Material Akustik Dengan Metode Impedance Tube. *JOURNAL OF ELECTRICAL AND SYSTEM CONTROL ENGINEERING*, 1(2).
- SAJIWO, A., & Harahap, G. Y. (2022). PROYEK PEMBANGUNAN SPBU SHELL ADAM MALIK. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).
- Rangkuti, A. H. (2022). Analisis Yuridis Persekongkolan Tender Rehabilitasi Jalan dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Kppu. 1/2018) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Kadir, A. (2017). Studi pemerintah daerah dan pelayanan publik.
- Hidayat, R. (2019). Implementasi Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Studi Meningkatkan Pelayanan Pada Masyarakat di Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Santoso, J. (2021). Analisis Kondisi Struktur Jalan Berdasarkan Metode RCI (Road Condition Index) Untuk Perencanaan Overlay Jalan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Sihombing, M., & Tarigan, U. (2013). Pengaruh Pangkat dan Kompetensi Pegawai Terhadap Pengembangan Karir pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan.
- Tarigan, U. (2018). Analisis Kualitas Pelayanan Publik dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur.
- Fauziah, I. (2009). Multiplikasi Tanaman Krisan (*Chrysanthemum sp.*) dengan Menggunakan Media MS (Murashige-Skoog) Padat.
- Hayati, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus Desa Lamamek, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh).
- Muda, I., & Masitho, B. (2019). Peranan Fraksi Partai Demokrat dalam Mendukung Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

- Siregar, N. S. S. (2019). *Implementasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Kebijakan Penertiban Hewan Ternak (Studi di Kecamatan IDI Rayeuk Kabupaten Aceh Timur)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Tarigan, U. (2006). *Analisa Kinerja Pegawai Badan Pengawas Kabupaten Gayo Lues*.
- Tarigan, U. (2007). *Prospek Kewenangan Daerah dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Tamiang*.
- Hasibuan, E. J., & Yolanda, A. (2023). *Strategi Komunikasi Humas dalam Mempertahankan Citra Positif Akibat Kasus Korupsi APBD di DPRD Sumatera Utara*.
- Azhar, S. (2013). *Studi Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Agresifitas Remaja Pemain Point Blank* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Tarigan, U., & Muda, I. (2013). *Kepemimpinan Keuchik (Studi Tentang Kepemimpinan Keuchik di Gampong Siti Ambia, Suka Makmur, Kuta Simboling, Teluk Ambun dan Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil)*.
- Tarigan, U. (2005). *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Aparatur (Kajian Sekretariat Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara)*.
- Tarigan, U., & Siregar, T. (2004). *Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat (Suatu Studi Deskriptif Analisis di Kantor Lurah Kelurahan Binjai Timur Kota Binjai)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Putri, R. D. (2019). *Implementasi Kebijakan Program Pensiun Dini Di PT. Telkom Regional 1 Sumatera* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Tarigan, U., & Ritonga, S. (2005). *Fungsi Pengawasan Kepegawaian Menunjang Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- LUMBANRAJA, W., & Harahap, G. Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN IRIAN SUPERMARKET TEMBUNG-PERCUT SEI TUAN SUMATERA UTARA. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Muda, I. (2018). *Teori Administrasi Publik*.
- Fahmi, A. M. (2021). *Analisis Pengaruh Pengganti Filler Dengan Abu Cangkang Sawit Terhadap Kinerja Perkerasan Aspal* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Tarigan, U. (2012). *Pengaruh Motivasi dan Kreatifitas Terhadap Kinerja Pamong Belajar di Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional I Medan*.
- Deliana, M. *Budaya Organisasi Salah Satu Faktor Penentu Kinerja Karyawan Organizational Culture as a Kind of Factor Employee's Performance*.
- Siregar, N. S. S. (2016). *Komunikasi terapeutik dokter dan paramedis terhadap kepuasan pasien dalam pelayanan kesehatan pada rumah sakit bernuansa islami di kota Medan* (Doctoral dissertation, Program Pasca sarjana UIN-SU).
- Tarigan, U., & Usman, D. A. (2007). *Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di Badan Diklat Provinsi Sumatera Utara*.
- Aulia, A. M., Tarigan, R. S., Wibowo, H. T., & Dwiatma, G. (2022). *Penerapan E-Gudang Sebagai Tempat Penampungan Ikan*.
- Novita, D. (2019). *Analisis Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan (Studi Pada Inspektorat Kota Langsa)*.
- Nobriama, R. A. (2019). *pengaruh pemberian pupuk organik cair kandang kelinci dan kompos limbah baglog pada pertumbuhan bibit Kakao (theobroma cacao l.) Di polibeg* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Tarigan, U., & Batubara, B. M. (2015). *Peran Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang (Rpd 2 FM) dalam Menunjang Program Pembangunan Daerah* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Tarigan, R. S. (2022). *KEBERMANFAATAN TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI PADA DUNIA PENDIDIKAN DI INDONESIA*.
- Eky Ermal, M. (2019). *PROFIL KINERJA RETURN DAN RESIKO PADA SAHAM TIDAK BERETIKA: STUDI KASUS PERUSAHAAN ROKOK DI INDONESIA*.
- Tarigan, U., & Sinaga, M. (2010). *Implementasi Manajemen Keuangan Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di SMA Negeri 2 Sibolga)*.
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2015). *Peranan Gaya Kepemimpinan Dalam Upaya Meningkatkan Prestasi Kerja di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Siregar, N. S. S. (2019). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Santoso, M. H. (2021). *Application of Association Rule Method Using Apriori Algorithm to Find Sales Patterns Case Study of Indomaret Tanjung Anom. Brilliance: Research of Artificial Intelligence, 1(2), 54-66*.

- Putri, A. O. (2017). *Analisis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan*.
- Batubara, B. M. (2023). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)*.
- Girsang, L. (2020). *Pengaruh Pelatihan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Lintas Aman Andalas Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Gunawan, I., Matondang, A., & Sembiring, M. (2020, February). *Lean Technology Implementation For Reducing The Dwelling Time Level. In Proceedings of the 1st International Conference of Global Education and Society Science, ICOGESS 2019, 14 March, Medan, North Sumatera, Indonesia*.
- Harahap, G. Y. (2004). *Decentralization and its Implications on the development of Housing in Medan*.
- Harahap, G. Y. (2020). *Instilling Participatory Planning in Disaster Resilience Measures: Recovery of Tsunami-affected Communities in Banda Aceh, Indonesia. Budapest International Research in Exact Sciences (BirEx) Journal, 2(3), 394-404*.
- Tarigan, U., & Suriadi, A. (2007). *Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Aceh Timur*.
- Tarigan, R. S. (2018). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Program Studi (SIPRODI)*.
- Siregar, N. I., & Aziz, A. (2012). *Model Pendidikan Karakter di SMA Swasta Brigjen Katamso Medan*.
- SIDABUTAR, P. R., & Harahap, G. Y. (2022). *IDENTIFIKASI PELAT LANTAI PERON TINGGI PADA PEMBANGUNAN STASIUN LUBUK PAKAM BARU. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Muda, I., & Angelia, N. (2018). *Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Mengelola Sektor Pariwisata Pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat*.
- MARPAUNG, A. D., & Harahap, G. Y. (2022). *PEMBANGUNAN PLTA PEUSANGAN 1 & 2 HYDROELECTRIC POWER PLANT CONTRUCTION PROJECT 88 MW-PENSTOCK LINE ACEH TENGAH. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.